



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SENIN, 6 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



Wabup Razia Warung Remang-Remang di Eks Tol HK Jabon



Satu Orang Terindikasi Sifilis, Puluhan Botol Miras Diamankan

JABON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS. Salah satunya melalui Operasi Penertiran Miras (OPM) yang digelar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan Disdikbud di kawasan wisata.



LAYANAN DIGITAL: Para operator Aplikasi Super App berdiskusi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

Permudah Pengaduan Warga, Diskominfo Operasikan Super App

SIDOARJO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo terus mengembangkan layanan publik berbasis digital. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan saat ini yakni *Super App*. Aplikasi tersebut menggabungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.

Kepala Diskominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan, pengembangan *Super App* berawal dari evaluasi layanan Call Center 112. Selama ini laporan masyarakat masih disampaikan melalui telepon sehingga petugas harus memastikan kembali lokasi kejadian sebelum diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Melalui *Super App*, nanti laporannya

akan langsung disertai titik koordinat sehingga petugas bisa lebih cepat menuju lokasi," katanya.

Setiap pengguna nantinya diwajibkan login menggunakan identitasnya. Hal tersebut untuk mengurangi tingginya *ghost call* atau panggilan palsu yang selama ini masuk ke layanan 112. Saat ini, memang hampir 80 persen panggilan yang masuk merupakan *ghost call*. Tak hanya untuk pengaduan, *Super App* juga akan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik milik OPD. "Kami menargetkan 104 aplikasi yang saat ini dikelola OPD dapat diintegrasikan secara bertahap," ujarnya.

Melalui *Super App*, masyarakat bisa memantau per-

kembangan laporannya. Mulai laporan diterima, diteruskan ke OPD yang menangani, hingga dinyatakan selesai akan tercatat dalam sistem. Fitur tersebut membuat penanganan aduan lebih cepat sekaligus memberi kepastian kepada masyarakat.

Untuk mendukung sistem itu, diskominfo juga membangun dashboard pemerintahan yang saat ini progresnya telah mencapai sekitar 60 persen. Dashboard itu akan menghubungkan data dari berbagai aplikasi OPD melalui Application Programming Interface (API). Nantinya, Bupati dan wabup dapat memantau data bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pajak, retribusi, hingga layanan publik dalam satu tampilan. (ful/hen)



PENCEGAHAN: Ilustrasi calon pengantin melaksanakan tes HIV terlebih dahulu.

Calon Pengantin Wajib Tes HIV

KOTA-Pemeriksaan HIV bagi calon pengantin (catin) di Kabupaten Sidoarjo kini menjadi syarat wajib sebelum menikah. Seluruh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan menjalani skrining kesehatan di puskesmas, tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Yayasan Delta Crisis Center (DCC) mencatat 22 calon pengantin di Kabupaten Sidoarjo terdeteksi positif HIV hingga awal Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 12 orang merupakan laki-laki dan 10 lainnya perempuan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdinkes) Kabupaten Sidoarjo, dr Hinu Tri Sulistijorini Ririn, menegaskan bahwa pemeriksaan HIV bagi calon

pengantin telah lama diterapkan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

"Calon pengantin wajib menjalani pemeriksaan di puskesmas. Yang diperiksa bukan hanya HIV, tetapi juga sifilis dan hepatitis melalui pemeriksaan triple eliminasi. Semua layanan ini gratis dan memang sudah menjadi kewajiban," tegas Hinu, Minggu (5/7).

Menurutnya, skrining kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini agar calon pengantin yang terdiagnosis HIV dapat segera memperoleh pengobatan dan pendampingan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

"Ada regulasinya. Ketika salah satu dinyatakan positif, hasilnya kami sampaikan dan langsung ditindaklanjuti dengan penanganan medis," ujarnya.

• Ke Halaman 10

Kami mendampingi 50 orang yang masih memperjuangkan haknya,"
Suyatno
Ketua FSPMI Sidoarjo



400 Pekerja Kena PHK Selama Enam Bulan

Disnaker Pastikan Hak Dipenuhi

SIDOARJO – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Delta masih terus bertambah. Selama Januari-Juni, tercatat ada 400 pekerja yang kena PHK. Angka tersebut naik 100 orang dibanding periode sama tahun lalu. Pekerja yang terdampak PHK berasal dari berbagai sektor usaha. Sebagian besar berasal dari sektor makanan dan

minuman (mamin). Disnaker memastikan, seluruh pekerja yang kena PHK mendapatkan pesangon sesuai haknya.

Sekretaris Disnaker Sidoarjo Anwar Khoifin mengatakan, kasus PHK masih berpotensi bertambah. Saat ini, ada 600 pekerja yang dirumahkan perusahaan. Mereka mendapat gaji tak utuh karena kondisi perusahaan yang lesu. "Kami berharap sebagian pekerja yang dirumahkan bisa masuk ke perusahaan lagi. Sehingga, tidak ada

pemutusan kerja," tambah Anwar. Disnaker tidak sekadar melakukan pendampingan. Menurut Anwar, Pemkab juga mendorong korban PHK mengikuti *job fair*.

Berjuang

Meminta Pesangon

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo Suyatno mengungkapkan, belum semua pekerja yang kena PHK mendapatkan haknya. Ada yang masih berjuang meminta pesangon. "Kami

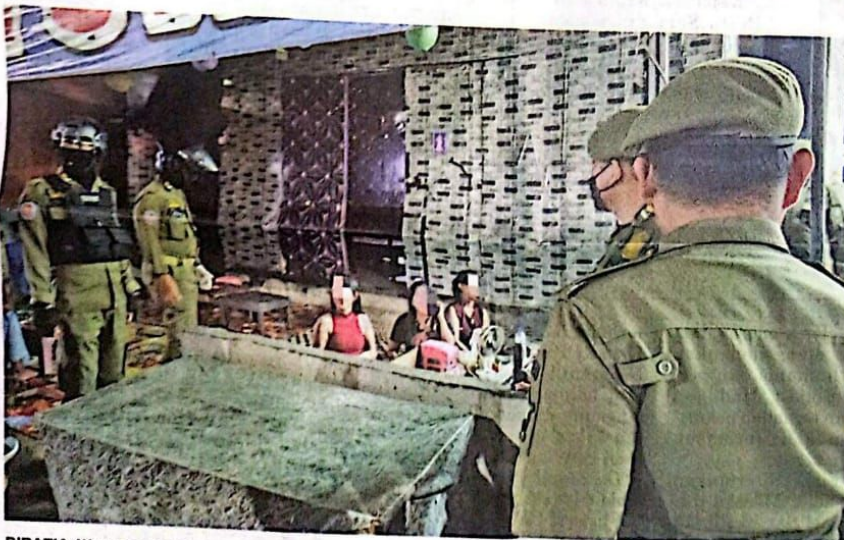
mendampingi 50 orang yang masih memperjuangkan haknya," kata Suyatno.

Menurut dia, perusahaan seharusnya tidak langsung melakukan PHK. Pekerja semestinya dirumahkan dengan upah penuh selama tiga bulan, kemudian dibayar 75 persen untuk tiga bulan berikutnya, dan 50 persen apabila kondisi perusahaan belum membaik. "Jangan langsung tiba-tiba dirumahkan dengan gaji 50 persen, apalagi langsung PHK," tambahnya. (ful/hen)



TEGAS: Satpol PP Sidoarjo bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menggelar razia di warung remang-remang kawasan eks Tol HK Jabon, Sabtu (4/7) malam.

Wabup Razia Warung Remang-Remang di Eks Tol HK Jabon



DIRAZIA: Warung remang-remang menyedilkan wanita pendamping bagi para tamu.



■ Satu Orang Terindikasi Sifilis, Puluhan Botol Miras Diamankan

JABON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Salah satunya melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil di kawasan warung kopi (warkop) remang-remang eks Tol Gempol-Porong (HK), Kecamatan Jabon, Sabtu (4/7) malam.

Dalam operasi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo Mi-

mik Idayana turun langsung. Sebanyak 49 orang yang terdiri atas pemandu lagu (LC), penjual, dan pengunjung menjalani rapid test HIV. Hasilnya, 48 orang dinyatakan negatif HIV, sedangkan satu orang terindikasi menderita sifilis atau infeksi menular seksual (IMS).

Petugas juga menyita 34 botol minuman keras (miras) dari sejumlah warung sebagai barang bukti. Seluruh botol miras diamankan

● Ke Halaman 10

Sambungan

Wabup Razia Warung...

ke Markas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo untuk proses lebih lanjut. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yany Setyawan, mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam menekan penyebaran HIV/AIDS sekaligus memberantas penyakit masyarakat. "Kasus HIV/AIDS di Sidoarjo masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara terpadu. Operasi ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga memberikan edukasi serta deteksi dini kepada kelompok yang berisiko," ujarnya.

Menurut Yany, selama operasi berlangsung petugas mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif. Meski demikian, tindakan tegas tetap diberikan terhadap pelanggaran yang ditemukan, termasuk peredaran minuman keras.

Sebanyak 252 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Mereka terdiri atas 210 personel Satpol PP, 15 personel Polresta Sidoarjo, lima personel Kodim 0816/Sidoarjo, lima personel Subdenpom 1/4-1 Sidoarjo, lima personel Garnisun, enam personel Disdukcapil, serta enam personel Dinas Kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Keten-

teraman Masyarakat (Tibumtras) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Raden Novianto Koesno Adi Putro, menjelaskan seluruh orang yang terjaring langsung dibawa ke Kantor Kecamatan Jabon untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi.

"Dari total 49 orang yang menjalani rapid test, sebanyak 48 orang dinyatakan negatif HIV, sedangkan satu orang terindikasi sifilis atau IMS. Selanjutnya akan dilakukan penanganan oleh tim kesehatan sesuai prosedur," jelasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memeriksa dokumen kependudukan para pemandu lagu, pengunjung, dan pemilik usaha. Mereka yang tidak membawa KTP didata dan

diberikan pembinaan.

Operasi Pekat ini digelar sebagai respons atas tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data hingga April 2026, jumlah kasus HIV/AIDS telah mencapai 7.129 orang atau bertambah 215 kasus dibandingkan Desember 2025 yang tercatat sebanyak 6.914

Calon Pengantin...

Hinu menjelaskan, hasil pemeriksaan HIV tidak serta-merta membatalkan rencana pernikahan. Setelah mendapatkan konseling dan terapi, pasangan tetap memiliki hak untuk melanjutkan pernikahan.

kasus. Kecamatan Porong, Krian, dan Jabon menjadi tiga wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.

Satpol PP memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pengawasan sekaligus upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. (dik/vga)

Agama (Kemenag). Bahkan, menurutnya, inisiatif tersebut berasal dari sektor kesehatan. "Kami berkolaborasi dengan Kemenag. Justu yang memajukan pemeriksaan ini dari kami, Dinas Kesehatan. Kemenag kemudian menyesuaikan dalam proses pemeriksaan."

Warkop Karaoke Tol HK Dirazia

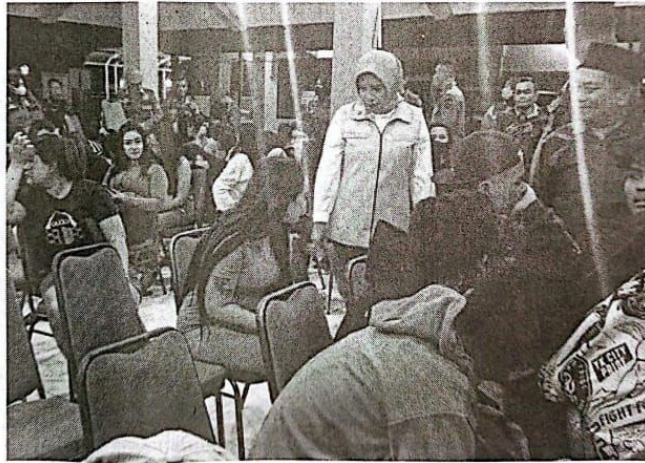
Puluhan Pemandu Lagu Dites Kesehatan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Puluhan penjaga warung angkringan dan pemandu lagu dites kesehatan, termasuk skrining HIV/AIDS, di Kantor Kecamatan Jabon, Sabtu (4/7) malam. Mereka terjaring razia Satpol PP yang digelar di kawasan Eks Tol HK Jabon pada malam akhir pekan tersebut.

Selain lapak PKL, razia menyasar warung angkringan dan warkop karaoke di kawasan tersebut. Razia berskala besar ini dipimpin langsung oleh Wabup Sidoarjo Mimik Idayana yang didampingi Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yanny Setiawan. Saat razia, dua warkop karaoke diduga menjual miras.

Wabup Mimik Idayana mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada tingginya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga



Wabup Mimik berbincang dengan penjaga warung angkringan dan pemandu lagu yang terjaring razia, di Kantor Kecamatan Jabon, Sabtu (4/7) malam. foto diskominfo

penertiban lokasi-lokasi diduga menjadi praktik berisiko terus dilakukan.

Karena itu pihaknya bersama Forkopimka Jabon melakukan sidak di Kawasan Eks Tol HK Jabon. Hasilnya, petugas gabungan menemukan dua warkop karaoke diduga menjual miras. "Pekerjanya kami data dan dilakukan pemeriksaan kesehatan," beber Mimik.

Puluhan penjaga angkringan dan pemandu lagu tersebut, mayoritas berasal dari luar Sidoarjo. Mereka bekerja di Kawasan itu mulai sore hari hingga dini hari. Soal tempat karaoke ilegal itu, Mimik menegaskan akan tetap melakukan penertiban.

Anggota DPRD Sidoarjo M Rojik yang hadir saat razia, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo melakukan razia di kawasan Eks Tol HK. Menurutnya, aktivitas di kawasan itu sudah meresahkan masyarakat dan tokoh agama di Jabon. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tempat Karaoke Eks Tol Jabon Dirazia

100 LC Skrining HIV AIDS

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana melakukan sidak dan razia PKL, angkringan, serta tempat karaoke di eks Tol Jabon bersama Satpol PP dan Forkopimka Jabon untuk penertiban dan pengendalian potensi penyebaran HIV/AIDS, Sabtu (4/7).

Operasi penertiban tersebut dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Yany Setyawan, bersama puluhan personel Satpol PP serta melibatkan jajaran Forkopimka Jabon sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjaga ketertiban umum sekaligus menekan

penyebaran HIV/AIDS.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua tempat karaoke yang masih beroperasi dan diduga menjual minuman keras.

Selain itu, puluhan wanita yang bekerja sebagai penjaga angkringan serta Lady Companion (LC) atau pemandu lagu diamankan ke Kantor Kecamatan Jabon untuk didata dan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk skrining HIV/AIDS.

Wakil Bupati mengatakan, tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, penertiban ter-

hadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik berisiko akan terus dilakukan.

"Angka HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi. Oleh karena itu malam ini kami bersama Forkopimka melaksanakan sidak. Memang ada beberapa tempat karaoke yang tutup diduga informasi telah bocor, namun kami masih menemukan dualokasi yang menjual minuman keras. Malam ini kami amankan sekaligus melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerjanya," ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 100 orang LC dan pemandu

lagu berhasil didata dalam operasi tersebut. Berdasarkan hasil pendataan sementara, sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo dan bekerja mulai sore hingga dini hari.

Terkait tindak lanjut terhadap tempat karaoke yang melanggar, Mimik menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengingat sebagian lokasi berada pada kewenangan instansi lain. Namun demikian, langkah penertiban akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait

mengenai kewenangan wilayahnya. Namun yang jelas, terhadap tempat-tempat yang melanggar aturan akan tetap dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen melakukan penanganan secara menyeluruh melalui penertiban lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik prostitusi, penguatan edukasi kesehatan kepada masyarakat, pendampingan sosial bagi para pekerja yang terjerang razia, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. (kri/jok/fer)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



LAYANAN DIGITAL:
Para operator Aplikasi Super App berdiskusi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

M. SAIFUL ROMMAN / JAWA POS

Permudah Pengaduan Warga, Diskominfo Operasikan Super App

SIDOARJO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo terus mengembangkan layanan publik berbasis digital. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan saat ini yakni *Super App*. Aplikasi tersebut menggabungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.

Kepala Diskominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan, pengembangan *Super App* berawal dari evaluasi layanan Call Center 112. Selama ini laporan masyarakat masih disampaikan melalui telepon sehingga petugas harus memastikan kembali lokasi kejadian sebelum diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Melalui *Super App*, nanti laporannya

akan langsung disertai titik koordinat sehingga petugas bisa lebih cepat menuju lokasi," katanya.

Setiap pengguna nantinya diwajibkan login menggunakan identitasnya. Hal tersebut untuk mengurangi tingginya *ghost call* atau panggilan palsu yang selama ini masuk ke layanan 112. Saat ini, memang hampir 80 persen panggilan yang masuk merupakan *ghost call*.

Tak hanya untuk pengaduan, *Super App* juga akan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik milik OPD. "Kami menargetkan 104 aplikasi yang saat ini dikelola OPD dapat diintegrasikan secara bertahap," ujarnya.

Melalui *Super App*, masyarakat bisa memantau per-

kembangan laporannya. Mulai laporan diterima, diteruskan ke OPD yang menangani, hingga dinyatakan selesai akan tercatat dalam sistem. Fitur tersebut membuat penanganan aduan lebih cepat sekaligus memberi kepastian kepada masyarakat.

Untuk mendukung sistem itu, diskominfo juga membangun dashboard pemerintahan yang saat ini progresnya telah mencapai sekitar 60 persen. Dashboard itu akan menghubungkan data dari berbagai aplikasi OPD melalui Application Programming Interface (API). Nantinya, Bupati dan wabup dapat memantau data bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pajak, retribusi, hingga layanan publik dalam satu tampilan. (ful/hen)

Jawa Pos

Kami mendampingi
50 orang yang masih
memperjuangkan
haknya."

Suyatno
Ketua FSPMI Sidoarjo



400 Pekerja Kena PHK Selama Enam Bulan

Disnaker Pastikan Hak Dipenuhi

SIDOARJO - Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Delta masih terus bertambah. Selama Januari-Juni, tercatat ada 400 pekerja yang kena PHK. Angka tersebut naik 100 orang dibanding periode sama tahun lalu.

Pekerja yang terdampak PHK berasal dari berbagai sektor usaha. Sebagian besar berasal dari sektor makanan dan

minuman (mamin). Disnaker memastikan, seluruh pekerja yang kena PHK mendapatkan pesangon sesuai haknya.

Sekretaris Disnaker Sidoarjo Anwar Khoifin mengatakan, kasus PHK masih berpotensi bertambah. Saat ini, ada 600 pekerja yang dirumahkan perusahaan. Mereka mendapat gaji tak utuh karena kondisi perusahaan yang lesu.

"Kami berharap sebagian pekerja yang dirumahkan bisa masuk ke perusahaan lagi. Sehingga, tidak ada

pemutusan kerja," tambah Anwar. Disnaker tidak sekadar melakukan pendampingan. Menurut Anwar, Pemkab juga mendorong korban PHK mengikuti *job fair*.

Berjuang Meminta Pesangon

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo Suyatno mengungkapkan, belum semua pekerja yang kena PHK mendapatkan haknya. Ada yang masih berjuang meminta pesangon. "Kami

mendampingi 50 orang yang masih memperjuangkan haknya," kata Suyatno.

Menurut dia, perusahaan seharusnya tidak langsung melakukan PHK. Pekerja semestinya dirumahkan dengan upah penuh selama tiga bulan, kemudian dibayar 75 persen untuk tiga bulan berikutnya, dan 50 persen apabila kondisi perusahaan belum membaik. "Jangan langsung tiba-tiba dirumahkan dengan gaji 50 persen, apalagi langsung PHK," tambahnya. **(ful/hen)**

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PELAKSANAAN KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
onal. "Sekaligus memperluas

Ukuran, Penguatan, dan Estimasi
Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain,

KELOMPOK HAJI DAN UMRAH
kata Ni Made. (raf/bas)

Ukuran dan Penguatan dari dua
rupakan akumulasi dari dua

Ukuran dan Penguatan dari dua
arto tetap meminta agar

Ukuran dan Penguatan dari dua
tetapi kehilangan kesem-

KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

CJH Estimasi Berangkat 2027 Bisa Siapkan Pelunasan

JAKARTA - Calon jemaah haji (CJH) yang masuk estimasi keberangkatan 2027 sudah bisa bersiap mulai sekarang. Khususnya persiapan kesehatan dan uang pelunasan. Meskipun secara resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum melansir nama resmi CJH yang berangkat tahun depan.

Pesan tersebut disampaikan langsung Menhaj Mochammad Irfan Yusuf di sela Rakernas sekaligus evaluasi haji 2026 di Jakarta. Kegiatan ini rencananya berlangsung sampai dengan besok (7/7).

Irfan merespon usulan dari parlemen. Yakni, segera mengumumkan nominasi atau daftar CJH yang berhak berangkat 2027. "Teman-teman Kemenhaj di daerah sudah bisa mulai sosialisasi, mereka punya daftarnya," kata Irfan. Dia menegaskan lewat sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat), perwakilan Kemenhaj di daerah bisa melihat siapa saja CJH estimasi berangkat tahun depan.

Irfan juga menyampaikan dalam waktu dekat mereka mengumumkan nama-nama CJH berhak melunasi biaya haji 2027. Sehingga bisa segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan jarak yang cukup panjang, sekitar setahun sebelum keberangkatan, CJH yang ada penyakit bisa berobat dahulu.

(wan/bas)

Mochammad Irfan Yusuf

Jawa Pos



DIKRY SANSINUTADAR SIDOARJO

BUTUH PERHATIAN: Kondisi Liponsos Sidoarjo yang masih membutuhkan ruang khusus bagi penghuni ODGJ.

Liponsos Butuh Ruang Khusus ODGJ dan Donasi Pakaian

KETERBATASAN sarana dan prasarana masih menjadi tantangan di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo. Selain membutuhkan ruang khusus untuk memisahkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan tingkat keparahan kondisinya, Liponsos juga kekurangan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pakaian layak pakai hingga matras.

Saat ini, sebanyak 102 penghuni masih menempati bangunan pinjaman. Kondisi tersebut membuat lansia dan ODGJ dengan kategori berat, sedang, hingga ringan masih berada dalam satu lingkungan sehingga penanganan belum dapat dilakukan secara ideal.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kabid Rehsos) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Ambarukmi, mengatakan keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi menghambat proses rehabilitasi, terutama bagi ODGJ yang kondisinya mulai membaik.

"Memang kami belum memiliki bangunan atau ruang khusus untuk memisahkan ODGJ berdasarkan kondisinya, mulai dari yang sudah membaik, dalam tahap pemulihan,

● Ke Halaman 10

Liponsos Butuh Ruang...

hingga yang masih sakit. Akibatnya, mereka masih bercampur," ujarnya, Minggu (5/7).

Menurut Diana, perlu perhatian khusus untuk ODGJ agar proses rehabilitasi berjalan lebih optimal. Meski para penghuni telah dipetakan sesuai tingkat kondisinya, keterbatasan fasilitas membuat mereka tetap

berada dalam satu area.

"ODGJ dengan kondisi berat, sedang, dan ringan seharusnya tidak ditempatkan dalam ruangan yang sama. Harapannya nanti tersedia ruang khusus untuk masing-masing kategori ODGJ," kata Diana. Selain itu, ODGJ yang kondisinya membaik juga perlu ruang khusus untuk beraktivitas. "Kami juga tidak memiliki anggaran untuk layanan laundry," jelasnya.

Selain kebutuhan ruang, Liponsos

juga mengalami kekurangan perlengkapan dasar. Pakaian menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak karena sebagian besar tidak dapat digunakan kembali setelah dipakai. "Kebutuhan besar pakaian harus disediakan oleh pemerintah," kata Diana. "Kami juga tidak memiliki anggaran untuk layanan laundry," jelasnya.

Adapun bantuan yang dibutuhkan

meliputi kaus oblong, celana, pakaian dalam pria dan wanita, bra, sarung, hingga matras atau tempat tidur. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, Dinsos bahkan kerap berkoordinasi dengan pihak lain untuk mendapatkan bantuan. "Kami juga tidak memiliki anggaran untuk layanan laundry," jelasnya.

Adapun bantuan yang dibutuhkan

sering disalahgunakan.

"Kalau menggunakan mangkuk, sering kali tidak dipakai untuk makan, tetapi digunakan untuk keperluan lain yang tidak semestinya, seperti buang air besar," ungkap Diana. "Kami juga mengajak masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pemangku kepentingan untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan penghuni Liponsos. (dik/vga)



PENCEGAHAN: Ilustrasi calon pengantin melaksanakan tes HIV terlebih dahulu.

Calon Pengantin Wajib Tes HIV

KOTA-Pemeriksaan HIV bagi calon pengantin (catin) di Kabupaten Sidoarjo kini menjadi syarat wajib sebelum menikah. Seluruh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan menjalani skrining kesehatan di puskesmas, tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Yayasan Delta Crisis Center (DCC) mencatat 22 calon pengantin di Kabupaten Sidoarjo terdeteksi positif HIV hingga awal Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 12 orang merupakan laki-laki dan 10 lainnya perempuan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdinkes) Kabupaten Sidoarjo, dr Hinu Tri Sulistijorini Ririn, menegaskan bahwa pemeriksaan HIV bagi calon

pengantin telah lama diterapkan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Calon pengantin wajib menjalani pemeriksaan di puskesmas. Yang diperiksa bukan hanya HIV, tetapi juga sifilis dan hepatitis melalui pemeriksaan triple eliminasi. Semua layanan ini gratis dan memang sudah menjadi kewajiban,” tegas Hinu, Minggu (5/7).

Menurutnya, skrining kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini agar calon pengantin yang terdiagnosis HIV dapat segera memperoleh pengobatan dan pendampingan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

“Ada regulasinya. Ketika salah satu dinyatakan positif, hasilnya kami sampaikan dan langsung ditindaklanjuti dengan penanganan medis,” ujarnya.

● Ke Halaman 10

Calon Pengantin...

Hinu menjelaskan, hasil pemeriksaan HIV tidak serta-merta membatalkan rencana pernikahan. Setelah mendapatkan konseling dan terapi, pasangan tetap memiliki hak untuk melanjutkan pernikahan.

“Faktanya banyak yang tetap memutuskan menikah. Sementara yang positif kami obati, sehingga tetap bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan pendampingan yang tepat,” katanya.

Ia menambahkan, kewajiban pemeriksaan kesehatan calon pengantin merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Kementerian

Agama (Kemenag). Bahkan, menurutnya, inisiatif tersebut berasal dari sektor kesehatan. “Kami berkolaborasi dengan Kemenag. Justru yang mewajibkan pemeriksaan ini dari kami, Dinas Kesehatan. Kemenag kemudian menyesuaikan dalam proses pelayanan pernikahan,” jelasnya.

Dinas Kesehatan berharap pemeriksaan kesehatan pranikah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah penularan kepada pasangan maupun bayi yang akan dilahirkan, sehingga kualitas kesehatan keluarga baru dapat terjaga sejak awal. (dik/vga)

✓ ANGGOT BORDAN JAWA POS

SATPOL PP

Razia di Kawasan Tol HK, Petugas Amankan 49 Pemandu Karaoke

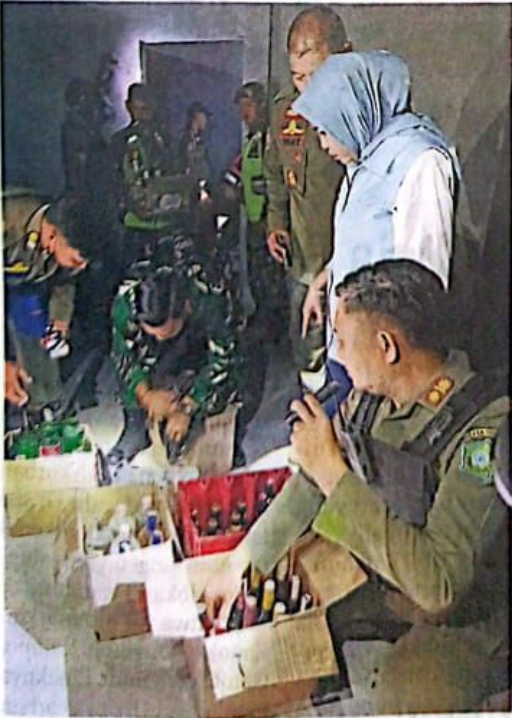
SIDOARJO – Sebanyak 49 wanita pemandu karaoke di warung wilayah Tol HK, Jabon, terjaring dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) aparat gabungan yang dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Sabtu (4/7) malam. Dari puluhan yang terjaring dan dites darah, satu wanita terindikasi penyakit menular seksual sifilis.

Kasatpol PP Sidoarjo Yany Setiyawan mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran HIV sekaligus penegakan ketertiban umum di wilayah Sidoarjo. "Seluruh yang terjaring diperiksa menjalani rapid test HIV serta pendataan administrasi kependudukan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif HIV. Namun, petugas menemukan satu orang yang terindikasi menderita sifilis. "Satu orang yang terindikasi sifilis dan akan ditindaklanjuti dinas kesehatan," ujarnya.

Ada 30 lebih warung remang-remang yang ditindak. Satpol PP Sidoarjo juga mengamankan 30 lebih botol minuman keras yang diduga ilegal. Seluruh tempat usaha diminta menghentikan sementara operasional hingga perizinan diberikan. "Kami tindak tegas untuk botol miras diduga ilegal ini," katanya.

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mengungkapkan, operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan penyakit menular sekaligus menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. "Ini bakal kita pantau rutin dan petugas bakal mengecek setiap hari," paparnya. (eza/hen)



POLSEK KRIAN

ILEGAL: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kanan) ikut memeriksa miras yang disita di kawasan Tol HK.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Anggota PWRI Sidoarjo Mahir Mainkan Alat-alat Musik Gamelan

Sidoarjo, Bhirawa
Persatuan Wredathama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi anggotanya untuk berlatih alat musik gamelan, karena ternyata banyak para purna tugas ASN Sidoarjo ini, punya minat dan bakat memainkan alat-alat musik tradisional Indonesia itu.

Mereka pun difasilitasi untuk latihan Seminggu dua kali. Selasa dan Jum at pagi, di pendopo delta wihawa Sidoarjo sisi belakang. Karena kebetulan disana, tersedia alat musik tradisional tersebut. Menurut Dra Nunik Ariyani MSI, Wakil Ketua 4 PWRI Sidoarjo, Bidang Budaya dan kerohanian, kemampuan para anggota PWRI Sidoarjo tersebut nantinya akan

ditampilkan dalam peringatan HUT PWRI ke -64 tahun 2026 ini. "Bapak-ibu yang latihan gamelan ini semoga terus semangat. Dan terus sehat. Semoga mereka juga senang dengan minat dan bakatnya ini," komentar mantan Kepala Dispenda Kabupaten Sidoarjo itu, ketika mendampingi para anggota PWRI Sidoarjo yang sedang latihan.

Karena sudah ada bakat dan minat, mereka dengan mudah dan lancar ketika diajari oleh dua orang seniman pembimbingnya. Suasana tempat latihan terdengar lantunan musik gamelan yang indah. "Saya senang bila mendengar musik gamelan, saya menjadi teringat jaman dulu, saat ini jarang terdengar musik gamelan, generasi sekarang harus dikenalkan, agar budaya nenek moyang kita ini tidak tenggelam oleh zaman," komentar Edy, salah satu anggota PWRI Sidoarjo yang ikut latihan bagian nembang. Informasi yang didapat tidak semua PWRI yang ada di Jawa Timur ini mempunyai kegiatan belajar gamelan dan karawitan seperti di

PWRI Sidoarjo. Sebagaimana diketahui, di PWRI Sidoarjo pada tahun 2025 lalu, masih belum ada kegiatan latihan gamelan dan karawitan seperti ini. Baru pada tahun 2026 ini. Ini setelah minat dan bakat para purna ASN Sidoarjo ini terungkap pada tahun 2026 ini. "Sempat diluncurkan beberapa waktu lalu," komentar Wakil Ketua 1 PWRI Sidoarjo, Effendy, yang ikut hadir melihat para anggota PWRI Sidoarjo itu latihan. Mantan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo tersebut berharap latihan para anggota PWRI Sidoarjo lancar, karena untuk uri- uri atau menghidupkan tradisi budaya Jawa ini. [kus.fen]



Anggota PWRI Sidoarjo semangat dalam latihan menabuh gamelan dan karawitan, seminggu dua kali.

H A R I A N
Bhirawa
Berita Sidoarjo Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Terapkan Aturan Baru

ASN Wajib Berbatik Khas dan Berudeng Pacul Gowang

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan batik khas Sidoarjo dan udeng Pacul Gowang melalui Surat Edaran Nomor 000.8/7922/438.1.3.1/2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal.

Surat edaran yang ditetapkan Bupati Sidoarjo H. Subandi pada Senin, 29 Juni 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, serta Direktur BUMD. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN.

Selain meningkatkan disiplin pegawai, aturan ini juga bertujuan memperkuat identitas dan rasa bangga terhadap budaya lokal, khususnya batik khas Sidoarjo.

Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa setiap hari Kamis seluruh ASN wajib mengenakan pakai-

an dinas harian batik khas Sidoarjo. Sementara pada hari Jumat dan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, pegawai diwajibkan mengenakan pakaian batik, tenun, atau lurik.

Khusus perangkat daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menerapkan enam hari kerja, penggunaan batik khas Sidoarjo juga diberlakukan pada hari Sabtu.

Selain itu, ASN pria yang mengenakan batik diwajibkan memakai tutup kepala berupa udeng Pacul Gowang bermotif batik khas Sidoarjo saat apel

pagi, penerimaan tamu, dan kegiatan kedinasan yang bersifat seremonial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo juga mengatur penggunaan pakaian khas daerah bermotif batik khas Sidoarjo pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo setiap 31 Januari maupun hari besar kebudayaan. ASN pria mengenakan sempong dan udeng bermotif batik khas Sidoarjo, sedangkan ASN perempuan mengenakan kain bawahan bermotif batik khas Sidoarjo.

Bupati Subandi menga-

takan, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap para perajin batik lokal agar terus berkembang.

"Kita terus membuka akses pasar yang lebih luas, menaikkan nilai jual produk lokal, serta membuktikan bahwa kualitas kain dan kerajinan Sidoarjo mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional," ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo juga akan terus memberikan pendampingan, kemudahan perizinan, serta akses permodalan

bagi para pelaku usaha kreatif, khususnya perajin batik.

Ia juga mengimbau masyarakat Sidoarjo untuk semakin mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, terutama hasil karya UMKM lokal.

"Utamakan produk UMKM Sidoarjo. Dengan membeli produk UMKM lokal, kita sedang membantu memutar roda ekonomi ribuan keluarga pekerja di Sidoarjo dan menjaga kemandirian ekonomi Sidoarjo," tegasnya. (hum/jok/fer)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



TAK BERTAHAN LAMA: Salah satu jungkat-jungkit yang mengalami kerusakan di alun-alun. Perbaikan sarana bermain masih ditanggung kontraktor.

Belum 3 Bulan Diperbaiki, Tiga Jungkat-Jungkit di Alun-Alun Rusak Lagi

SIDOARJO – Belum tiga bulan diperbaiki, tiga jungkat-jungkit di Alun-alun Sidoarjo rusak lagi. Pemkab mendorong kontraktor untuk segera melakukan perbaikan. Tampak, bagian poros alat bermain patah hingga papan dudukan terlepas dari penyangga. Dua jungkat-jungkit lainnya juga mengalami kerusakan yang sama persis yakni patah di tengah. Kerusakan diketahui sudah berlangsung selama tiga minggu. Kabid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH)

DLHK Sidoarjo Vira Murti Krida Laksmi mengatakan, penanganan fasilitas masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Sebab proyek Alun-Alun Sidoarjo masih berada dalam masa pemeliharaan selama satu tahun. "Sudah saya komunikasikan. Biar nanti kontraktor yang memperbaiki," katanya kemarin (5/7). Dia menjelaskan, kerusakan dipicu penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Jungkat-jungkit yang dirancang untuk anak-anak dengan ka-

pasitas kurang dari 50 kilogram itu kerap dimainkan orang dewasa. Menurut Vira, kontraktor belum dapat mengganti material dengan spesifikasi berbeda selama masa pemeliharaan masih berlangsung. Perbaikan tetap harus mengacu pada spesifikasi teknis yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah masa pemeliharaan berakhir, Vira akan mengevaluasi penggunaan material yang lebih kuat agar kerusakan serupa tidak kembali terulang. (ful/hen)

Jawa Pos

Saluran No. 466, Pemkab Magelang bersama The Nike
Jude Fun Run 2026, Minggu (5/7). Kegiatan itu dihadiri
lak sekaligus memberikan hadiah dan foto bersama.

Kan Kompetisi, karena tidak ada
prestasi tanpa kompetisi. "un-
gkap Buapati. [dar.wwn]

Aksi Atlet Taekwondo Tutup Porkab Sidoarjo 2026

Sidoarjo, Bhirawa

Aksi dari atlet-atlet Cabor Taekwondo Sidoarjo, Minggu (5/7) akhir pekan lalu, menutup kegiatan PORKAB Sidoarjo 2026, di gedung serba guna GOR Sidoarjo.

Sebagaimana diketahui, jadwal Porkab Sidoarjo pada 15 - 30 Juni. Tetapi pelaksanaan di Cabor Taekwondo mundur, karena banyak event pertandingan yang harus diikuti, baik oleh para atlet dan para wasit yang dimiliki pengkab Taekwondo Sidoarjo.

Ketua Pengkab Taekwondo Sidoarjo, Andi Martinez, mengutarakan ada atlet - atlet taekwondo dari Sidoarjo yang harus mengikuti event di sejumlah luar kota.

Diantaranya kejuaraan kesatrian Internasional di Kota Bandung dan kejuaraan kesatrian Internasional di Kota Kediri. Di Kota Bandung, atlet Taekwondo berhasil merebut 1 medali emas di kelas Kadet. Sementara di Kota Kediri, merebut medali perak. "Semoga atlet-atlet taekwondo Sidoarjo terus berprestasi sampai nanti pada Porprov Jatim 2027," komentarnya, ketika hadir dalam Porkab Cabor Taekwondo di gedung serba guna GOR Sidoarjo.

Dalam PORKAB Taekwondo

yang digelar, nomor yang dipertandingkan adalah nomor seni dan nomor fighting. Jumlah peserta ada sebanyak 50 atlet. Mereka berusia 16 - 22 tahun. "Disampaikan Andi, di Sidoarjo pembibitan atlet taekwondo dimulai pada usia dini. Di sejumlah club, ada yang membina atlet minimal usia 5 sampai 6 tahun. Para orang tua mendukung anaknya aktif dengan olah raga ini. Diantaranya karena prestasi, kesehatan, jaga diri dan saat ini bisa sebagai jalur prestasi anak bisa masuk sekolah negeri," ungkap Andi.

"Selain itu, para orang juga mendukung, agar anak mereka setiap hari tidak kecanduan bermain dengan HP," lanjut Andi.

Karena prestasi pada Cabor taekwondo, menurut Andi, ada seorang atlet dari Sidoarjo bisa diterima masuk di Universitas Brawijaya Malang. Atlet ini sempat memperoleh emas pada Porprov Jatim tahun 2025 lalu di Malang raya.

Ketua PB Porkab Sidoarjo 2026, Imam Jawahir, yang hadir dalam Porkab Sidoarjo Cabor Wushu, berpesan agar para atlet mempersiapkan diri untuk berlaga di Porprov 2027 di Surabaya. [kus.wwn]



ai.kus.bhirawa

Pelatih Cabor Taekwondo Sidoarjo memberi semangat atletnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

**DPDR Sidoarjo Berduka, Legislator F-PDIP Bambang Riyoko Wafat,
Tinggalkan Kenangan Mendalam bagi Sahabat**



SIDOARJO – Kabar duka menyelimuti keluarga besar PDI Perjuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Bambang Riyoko, SE, legislator senior asal Dapil V (Taman – Sukodono), mengembuskan napas terakhirnya secara mendadak pada Sabtu (4/7/2025) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Kepergian almarhum yang begitu cepat meninggalkan duka mendalam sekaligus rasa tidak percaya bagi keluarga, kolega di DPRD, serta para sahabat di internal partai. Pasalnya, beberapa jam sebelum berpulang, Bambang Riyoko masih tampak bugar dan mendedikasikan waktunya untuk menghadiri Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) Penjurangan Calon Ketua Ranting dan Anak Ranting se-Kabupaten Sidoarjo di Kantor DPC PDIP Sidoarjo, Jalan Jati, pada Jumat (3/7/2025) malam. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP Sidoarjo Hari Yulianto tersebut, almarhum selaku Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Kehormatan DPC PDIP Sidoarjo sekaligus Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, duduk berdampingan dengan pengurus harian lainnya, termasuk H. Choirul Hidayat, SH. Kepergian Bambang Riyoko yang mendadak ini menyisakan kenangan emosional bagi H. Choirul Hidayat, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Organisasi, dan SDM DPC PDIP Sidoarjo. Melalui unggahan di status WhatsApp pribadinya, Choirul membagikan foto kebersamaan terakhirnya yang duduk bersebelahan dengan almarhum saat Rakorcab berlangsung. “Ternyata malam tadi perbincangan kita yang terakhir... Sugeng tindak Mas (selamat jalan Mas). Saya bersaksi jenengan tiyang sae (Anda orang baik),” tulis Choirul Hidayat dengan nada penuh duka. Kabar duka ini pertama kali dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDIP Sidoarjo, Rahmat Pavi Harjo, melalui pesan resmi di grup internal Seduluran PDIP sekitar pukul 02.00 WIB. Bambang Riyoko, yang juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024, memang diketahui sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, semangat pengabdianya terhadap masyarakat dan partai tidak pernah surut hingga akhir hayatnya. Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Gadung No. 9, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga dan kerabat, jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat pada hari Sabtu (4/7/2025) siang ini pukul 11.00 WIB. Selamat jalan, Bambang Riyoko. Dedikasi dan perjuanganmu untuk Sidoarjo akan selalu dikenang. [dar/nata/red]





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

FKB DPRD Sidoarjo Siapkan Bantuan Pakaian Layak Pakai hingga Alas Tidur untuk Para Penghuni Liponso



SIDOARJO (Radarlatim.id) – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang ke 28 tahun pada 23 Juli 2026 ini, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo akan menggelar beberapa kegiatan, baik itu yang bersifat seremonial hingga bakti sosial. Salah satunya, DPC PKB Sidoarjo telah menginstruksikan jajarannya hingga ditingkat yang paling bawah untuk aksi sosial penggalangan donasi baju layak pakai dan matras untuk penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liponso) Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dilakukan setelah anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melihat langsung kondisi Liponso yang dihuni oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), lanjut usia (lansia) hingga orang terlanjar itu masih sangat memprihatinkan. H. Usman, Bendahara Umum (Bendum) DPC PKB Sidoarjo mengatakan bahwa aksi kemanusiaan itu akan melibatkan seluruh anggota FKB DPRD Sidoarjo beserta jajaran pengurus partai di tingkat kecamatan hingga desa. “Bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan langsung kepada penghuni Liponso yang selama ini hidup dengan berbagai keterbatasan,” kata H. Usman kepada awak media disela-sela kegiatan Jum’at Fraksi di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Jum’at (3/7/2026). Mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 itu menyapaikan bahwa penggalangan donasi akan digerakkan oleh 15 anggota FKB DPRD Sidoarjo dengan melibatkan struktur kepengurusan PKB ditingkat kecamatan hingga desa, agar bantuan yang terkumpul semakin banyak dan dapat menjangkau seluruh kebutuhan penghuni Liponso. Tidak hanya pakaian layak pakai saja, FKB DPRD Sidoarjo juga akan mengumpulkan matras atau alas tidur. Sebab masih ada penghuni yang terpaksa harus tidur dilantai, karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki Liponso. “Selain baju, mereka juga membutuhkan matras. Saat ini masih ada yang tidur beralaskan lantai. Ini menjadi perhatian kami, karena mereka juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” sampainya. FKB DPRD Sidoarjo menilai bahwa kondisi Liponso membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Minimnya sarana dan prasarana, bercampurnya penghuni dengan kondisi yang berbeda, hingga keterbatasan fasilitas penunjang dinilai perlu segera dibenahi melalui dukungan anggaran yang memadai. Anggota DPRD Sidoarjo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 1 itu berharap aksi sosial tersebut dapat meringankan beban para penghuni, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembenahan Liponso tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Tetapi juga memerlukan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi ODGJ, lansia dan warga terlanjar. “Kami akan terus mengawal berbagai aspirasi dan hak-hak dari masyarakat. PKB akan selalu hadir ditengah masyarakat,” pungkasnya. (mams)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Warung Remang-remang Exit Tol Jabon Jadi Sorotan, DPRD Minta Segera Ditertibka



SIDOARJO – Desakan penertiban warung remang-remang di kawasan Exit Tol Jabon memasuki babak baru. Setelah menerima berbagai keluhan masyarakat, Komisi A DPRD Sidoarjo secara resmi merekomendasikan penutupan sekaligus pembongkaran bangunan yang terbukti digunakan sebagai lokasi praktik maksiat. Rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat dengar pendapat yang mempertemukan Komisi A DPRD Sidoarjo dengan Forkopimka Jabon, Komisi C DPRD Sidoarjo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa. Forum itu digelar sebagai tindak lanjut atas keresahan warga yang selama ini menilai aktivitas di kawasan tersebut telah mengganggu ketertiban sosial. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faldin, mengatakan keputusan tersebut lahir setelah berbagai laporan masyarakat menunjukkan adanya dugaan praktik maksiat yang berlangsung secara terbuka. “Kami sepakat menutup warung remang-remang yang dijadikan tempat maksiat,” ujarnya, Rabu (1/7/2026) sore. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat lagi ditoleransi karena dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi lingkungan, terutama terhadap generasi muda. “Sudah tidak ada malu-malunya, bahkan dilakukan secara terbuka. Ini membahayakan generasi muda,” tegasnya. Selain persoalan dugaan prostitusi terselubung, rapat juga menyoroti maraknya peredaran minuman keras ilegal di kawasan Exit Tol Jabon. Persoalan itu dinilai semakin memperkuat alasan perlunya penertiban secara menyeluruh. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Ainun Jariyah, mengungkapkan bahwa aspirasi penutupan tidak hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga organisasi keagamaan yang merasa prihatin terhadap kondisi di lapangan. “Muslimat NU di Jabon cerita, ada anak-anak yang diberi uang Rp5.000 hanya karena menyalak korek gas di warung remang-remang. Ini mengkhawatirkan,” ungkapnya. Di sisi lain, Kepala Desa Dukuhsari, Ikhwani Widodo, menyebut terdapat sekitar 25 warung remang-remang yang berdiri di wilayahnya. Ia berharap penertiban benar-benar dilakukan hingga tuntas agar persoalan serupa tidak kembali terulang. “Kami betul-betul berharap bisa diberantas karena dampaknya luar biasa bagi masyarakat,” tambahnya. Ikhwani juga menegaskan bahwa pemerintah desa tidak terlibat dalam aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Komisi A DPRD Sidoarjo menekankan bahwa rekomendasi pembongkaran tidak ditujukan kepada seluruh pelaku usaha. Bangunan yang ditertibkan hanya yang terbukti digunakan sebagai tempat maksiat, sedangkan warung yang menjalankan usaha secara normal tetap diperbolehkan beroperasi. “Warung angkringan yang baik-baik tetap dipertahankan. Hanya yang terbukti jadi tempat maksiat dibongkar,” jelasnya. Untuk memastikan penertiban berjalan efektif, DPRD meminta pelaksanaannya melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat. “Kami minta bergerak bersama dengan TNI, Polri, dan ormas agar eksekusi berjalan efektif,” kata Gus Rizza lagi. Sebelum eksekusi dilakukan, DPRD Sidoarjo berencana menggelar rapat lanjutan bersama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Langkah tersebut diperlukan mengingat sebagian lahan di kawasan Exit Tol Jabon berada di bawah pengelolaan BPLS maupun Jasa Marga sehingga penyelesaian administrasi harus dipastikan lebih dahulu. Sebelumnya, Satpol PP Sidoarjo pernah menggelar razia di kawasan tersebut dan menemukan sejumlah pemandu lagu serta puluhan botol minuman keras. Temuan itu menjadi salah satu dasar penguatan rekomendasi DPRD agar penanganan dilakukan secara terpadu lintas instansi. Komisi A berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga kawasan Exit Tol Jabon dapat kembali kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

